



PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025 – 2029

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH





RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun sebagai pedoman dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya. Berisikan serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan menjadi panduan bagi insan perencana lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, juga sebagai informasi bagi semua pihak guna mewujudkan pembangunan daerah yang lebih terarah, terencana, dan berkelanjutan sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah, *BERSAMA MEMBAWA SELAYAR MAJU DAN SEJAHTERA*.

Benteng, Agustus 2025
KEPALA BAPPERIDA

Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 19840104 200903 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB.I. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Landasan Hukum.....	2
I.3. Maksud dan tujuan.....	6
I.4. Sistematika Penulisan	7
BAB.II. GAMBARAN PELAYANAN BAPPERIDA	
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.....	8
II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bapperida	8
II.2. Sumber Daya Bapperida.....	16
II.3. Kinerja Pelayanan Bapperida.....	19
II.4. Kelompok Sasaran Layanan	30
II.5. Mitra Perangkat Daerah dalam memberikan layanan....	30
II.6. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	30
II.7. Isu Strategis	32
BAB.III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN	
ARAH KEBIJAKAN	34
3.1. Tujuan Strategis.....	34
3.2. Sasaran Strategis	35
3.3. Strategi PD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	
Renstra PD Tahun 2025-2029	38
3.4. Arah Kebijakan PD dalam Mencapai Tujuan dan	
Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	41
BAB.IV. PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	42
BAB.V. PENUTUP	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah pegawai ASN berdasarkan jenjang Pendidikan tahun 2024	16
Tabel 2.2.	Jumlah pegawai ASN berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2024.....	17
Tabel 2.3.	Jumlah Pegawai ASN yang menduduki jabatan Tahun 2024.....	17
Tabel 2.4.	Jumlah Aset Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar per Desember 2024	18
Tabel 2.5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar 2022-2030	20
Tabel 2.6.	Matriks Program Prioritas Daerah yang Mendukung Prioritas Nasional	24
Tabel 2.7.	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024	26
Tabel 2.8.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2024	28
Tabel 2.9.	Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	32
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapperida	37
Tabel 3.2.	Penahapan Renstra PD	40
Tabel 3.3.	Rumusan Arah Kebijakan Restra Perangkat Daerah	41
Tabel 4.1.	Rumusan Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra PD	43
Tabel 4.2.	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	58
Tabel 4.3.	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	74
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama PD	77
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Kunci PD	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan dan Tahapan penyusunan Renstra-PD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.....	2
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Bapperida Kepulauan Selayar...	10
Gambar 2.2. Penjabaran RPJMD kedalam RKPD 2017-2023	22
Gambar 2.3. Evaluasi RPJMD Kepulauan Selayar 2017-2023	22

BAB I

PENDAHULUAN

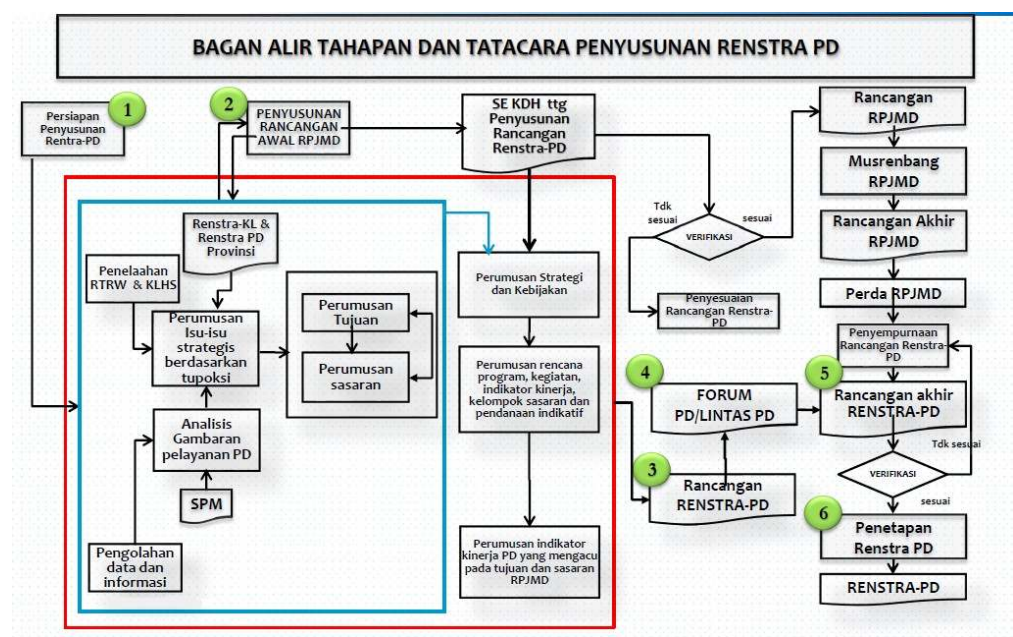
1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan lima Tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib, Pilihan dan/atau Urusan Penunjang Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah, disusun menyelaraskan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar yang di dalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan daerah kurun waktu lima tahun mendatang dan bersifat indikatif, dengan demikian konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi dapat dicapai sehingga mempermudah pengembangan sharing pembiayaan dengan pemerintah pusat.

Proses penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum Forum Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra.

Gambar 1.1
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra PD Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Bapperida adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2020 Nomor 288);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 135);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor .. Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Pertauran Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 138;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
27. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah, dijabarkan secara operasional dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang berfokus pada perencanaan pembangunan daerah, riset, inovasi, serta pengelolaan data dan informasi strategis untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029.

2. Tujuan

Rencana Strategis Bapperida disusun dengan tujuan:

- a. Menjabarkan visi, misi dan program RPJMD ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pada Perangkat Daerah;
- b. Menyelaraskan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029;
- c. Memudahkan seluruh unit kerja dalam menyusun Rencana Kerja, Program dan Kegiatan yang menunjang tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar;

- d. Sebagai dasar dalam evaluasi kinerja Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

Perangkat Daerah Berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, Sumber Daya, kinerja pelayanan perangkat daerah, keompok sasaran layanan, identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah, serta isu strategis.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi tentang rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja

Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi tentang uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif dalam yang mendukung program prioritas Pembangunan daerah.

BAB V Penutup

Berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, dan hal-hal yang diperlukan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPERIDA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bapperida

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi, disebutkan bahwa Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bapperida mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah, pengkajian penerapan invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan, penelitian dan

pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;

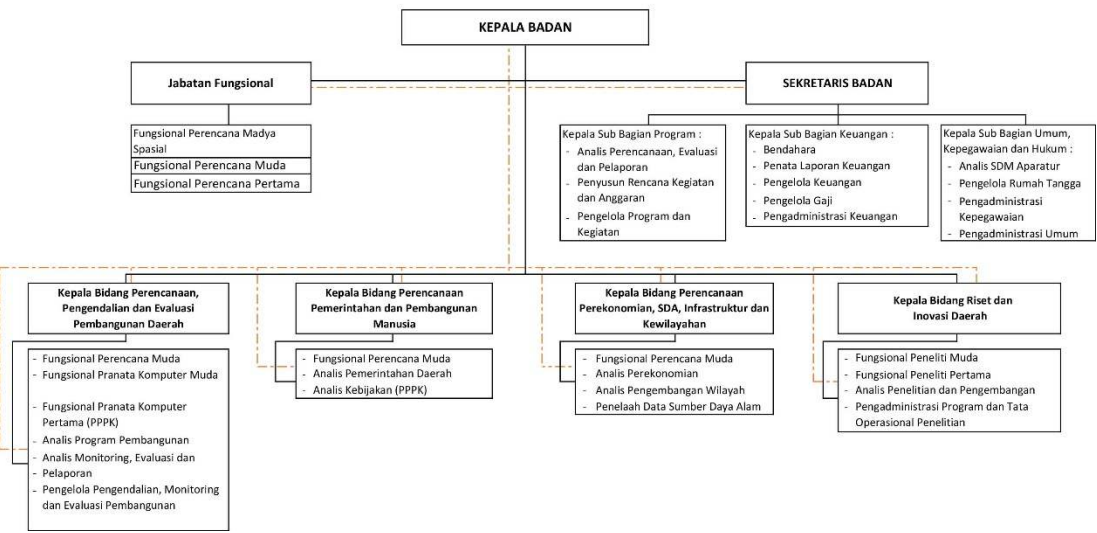
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari :

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- 3. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan;
- 4. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 5. Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 6. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Bapperida digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bapperida Kep Selayar



Struktur Organisasi Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar No 44 Tahun 2024

Uraian tugas dan fungsi Kepala Bapperida, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Sub Bagian sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Badan mempunyai Tugas membantu membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan-undangan. Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan Fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah, pengkajian penerapan invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris melaksanakan Fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;

- b. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
- c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

- a. Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja;
- b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan;
- c. Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

(3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan melaksanakan Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang perencanaan, pengendalian dan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait Tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan adalah unsur penunjang fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

(4) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melaksanakan Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan

- f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai Tugas dan Fungsinya.

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia merupakan unsur penunjang fungsi pelaksana perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

(5) Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan melaksanakan Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan; dan
- f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan Tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur adalah unsur penunjang fungsi pelaksana perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

(6) Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang riset dan inovasi Daerah. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang riset dan inovasi Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang riset dan inovasi Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di bidang riset dan inovasi Daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang riset dan inovasi Daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang riset dan inovasi Daerah;
- f. pelaksanaan administrasi di bidang penelitian dan pengembangan Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Riset dan Inovasi merupakan unsur penunjang fungsi pelaksana riset dan inovasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

(7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.

2.2. Sumber Daya Bapperida

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan data kepegawaian Bapperida Kepulauan Selayar per Desember 2024 terdiri atas pegawai ASN dan Non ASN sebanyak 63 pegawai, dengan rincian Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 30 orang dan pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 33 orang. Jumlah dan komposisi pegawai ASN dan Non ASN pada Bapperida Kepulauan Selayar Tahun 2024 berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel. 2.1.
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Berdasarkan
Jenjang Pendidikan Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai	Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap Non ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai
	Perguruan Tinggi	27	87,10%	44,26%	23	76,67%	37,70%
1	S3	2	6,45%	3,28%			
2	S2	12	38,71%	19,67%			
3	S1	13	41,94%	21,31%	22	73,33%	36,07%
4	D3	0	0,00%	0,00%	1		
	Bukan Perguruan Tinggi	4	12,90%	6,56%	7	23,33%	11,48%
1	SMA	4	12,90%	6,56%	7	23,33%	11,48%
Jumlah		30			31		
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN dan Non ASN)		61					

Sumber : Bapperida Kepulauan Selayar 2024

Selanjutnya untuk pegawai ASN bila dilihat dari golongan/ruang, dari 30 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 7 pegawai (23%), golongan III sebanyak 20 pegawai (67%), dan golongan II sebanyak 3 pegawai (10%), dimana secara detail dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel. 2.2.
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan / Ruang Tahun 2024

No	Golongan / Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1.	Golongan IV	10	32%
	IV/c	1	3%
	IV/a	9	29%
2.	Golongan III	19	61%
	III / d	8	26%
	III / c	4	13%
	III / b	4	13%
	III / a	3	10%
3.	Golongan II	2	6%
	II / d	0	0%
	II / c	2	6%
	II / b	0	0%
Jumlah		31	100%

Sumber : Bapperida Kepulauan Selayar 2024

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 30 pegawai ASN terdapat 1 pegawai (3.33%) yang menduduki eselon II, 5 pegawai (16,67%) yang menduduki eselon III, 3 pegawai (10%) yang menduduki eselon IV, 11 pegawai (36.67%) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu, serta 10 pegawai (33.33%) yang termasuk dalam jabatan fungsional umum, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut.

Tabel. 2.3.
Jumlah, Pegawai ASN yang Menduduki Jabatan Tahun 2024

No	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1	Eselon II	1	3,23%
2	Eselon III	5	16,13%
3	Eselon IV	3	9,68%
4	Jabatan Fungsonal Tertentu	11	35,48%
5	Jabatan Fungsonal Umum	11	35,48%
Jumlah		30	100%

Sumber : Bapperida Kepulauan Selayar 2024

2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapperida dapat berjalan dengan baik, perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar secara berkesinambungan, daya dukung sarana penunjang operasional tersebut diantaranya adalah peralatan dan perlengkapan perkantoran yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel. 2.4.
Jumlah Aset Bapperida Kepulauan Selayar
per Desember 2024

KODE ASET	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
	1	2	3
03	ASET TETAP		
01	Tanah		-
	01 Tanah		
02	Peralatan Dan Mesin	344	3.164.122.955,00
	01 Alat Besar		
	02 Alat Angkutan	36	1.123.639.100,00
	03 Alat Bengkel Dan Alat Ukur	2	16.651.550,00
	04 Alat Pertanian		-
	05 Alat Kantor Dan Rumah Tangga	173	836.155.995,00
	06 Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	13	170.523.200,00
	07 Alat Kedokteran Dan Kesehatan		-
	08 Alat Laboratorium	5	3.680.000,00
	09 Alat Persenjataan		
	10 Komputer	114	989.473.110,00
	11 Alat Eksplorasi		
	12 Alat Pengeboran		
	13 Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian		20.000.000,00
	14 Alat Bantu Eksplorasi		
	15 Alat Keselamatan Kerja	1	4.000.000,00
	16 Alat Peraga		
	17 Peralatan Proses/Produksi		
	18 Rambu - Rambu		
	19 Peralatan Olah Raga		
03	Gedung Dan Bangunan	4	2.728.745.053,00
	01 Bangunan Gedung	4	2.728.745.053,00
	02 Monumen		
	03 Bangunan Menara		
	04 Tugu Titik Kontrol/Pasti		
04	Jalan, Jaringan Dan Irigasi		-
	01 Jalan Dan Jembatan		
	02 Bangunan Air		
	03 Instalasi		
	04 Jaringan		
05	Aset Tetap Lainnya	1	144.405.800,00

KODE ASET	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
	1	2	3
01	Bahan Perpustakaan	1	144.405.800,00
02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga		
03	Hewan		
04	Biota Perairan		
05	Tanaman		
06	Barang Koleksi Non Budaya		
07	Aset Tetap Dalam Renovasi		
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan		-
01	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
05	Aset Lainnya	105	165.643.687,00
02	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		-
01	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		
03	Aset Tidak Berwujud		56.800.000,00
01	Aset Tidak Berwujud	2	56.800.000,00
04	Aset Lain-Lain		618.808.750,00
01	Aset Lain-Lain	103	618.808.750,00
05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(48.747.666,67)
01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(48.747.666,67)
06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(461.217.395,84)
01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(461.217.395,84)

Sumber : Bapperida Kab. Kepulauan Selayar 2024

2.3. Kinerja Pelayanan Bapperida

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, bahwa kedudukan Badan Perencanaa Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, riset dan inovasi daerah, dengan tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan- undangan. Capaian Indikator Kinerja pelayanan Bapperida disajikan pada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-6	-7	-8	-9	-11	-12	-13	-14	-16	-17	-18	-19
	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah			n/a	80%	85%	90%	88%	91%	90%	N/A	88%	114%	105%	N/A
	Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah			n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Nilai Sakip			B 60	B 60	B 60	BB 70	CC 52,36	B 60,84	BB 70,1	BB 72,95	87,3%	101,4%	116,8%	104,2%
	Indeks Kepuasan Masyarakat			n/a	C 65	B 76,61	B 76,61	N/A	C 76,3	B 79,7	B 82,11	N/A	117,4%	104,0%	107,2%
	Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan			n/a	Sesuai	Sesuai	Sesuai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Persentase Nilai Temuan Keuangan			n/a	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD		√	n/a	80%	85%	90%	88,04%	91,01%	89,62%	N/A	88%	114%	105%	N/A
	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah		√	n/a	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	88%	125%	118%	111%
	Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan inovasi daerah		√	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3.1. Kinerja Pelayanan Urusan Perencanaan

Capaian kinerja urusan perencanaan dengan indikator sasaran persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah digunakan untuk mengukur sejauh mana dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, dan dokumen turunannya, saling terintegrasi serta selaras dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, provinsi, tujuannya agar 1) efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan dalam pencapaian target pembangunan meningkat, 2) tumpang tindih kebijakan atau program antar perangkat daerah dapat dihindari, sehingga pembangunan lebih terarah dan tepat sasaran. 3) perencanaan yang berbasis data dan bukti untuk menghasilkan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta berjalan lebih efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

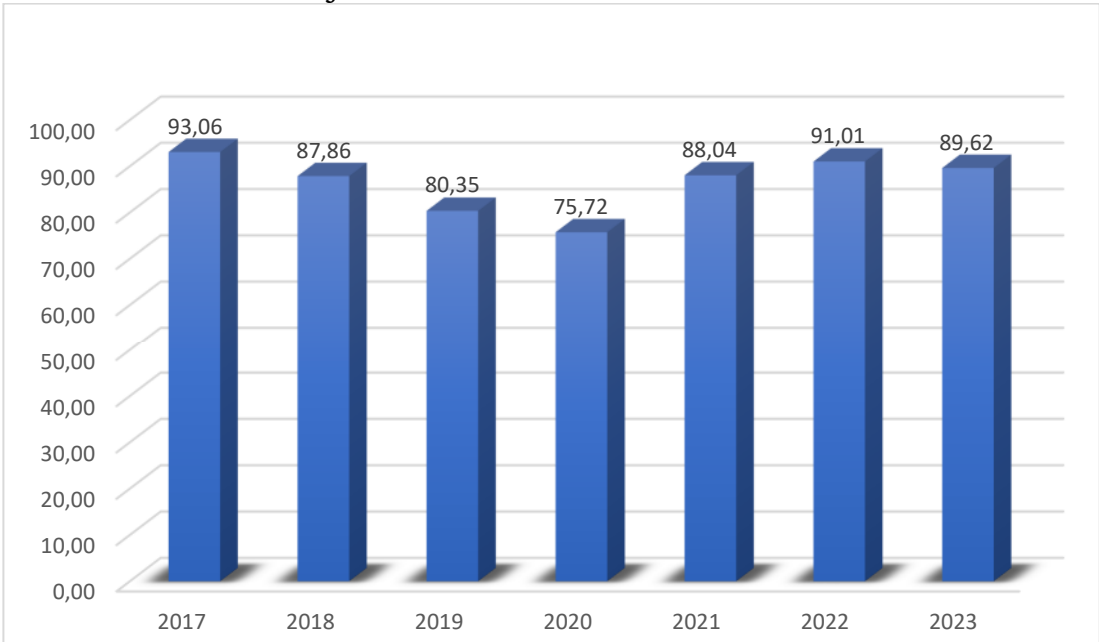
Indikator Kinerja sasaran ini (outcome) didukung dengan 2 (dua) Program yang di lengkapi indikator intermediate outcome, yakni 1) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD; dan 2) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah.

Penjelasan Capaian Indikator Program (intermediate Outcome)

- Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD, Indikator ini menunjukkan seberapa baik program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah program RPJMD yang tercantum dalam RKPD dan jumlah program RPJMD yang seharusnya ada dalam RKPD. Persentase konsistensi penjabaran program dalam RKPD

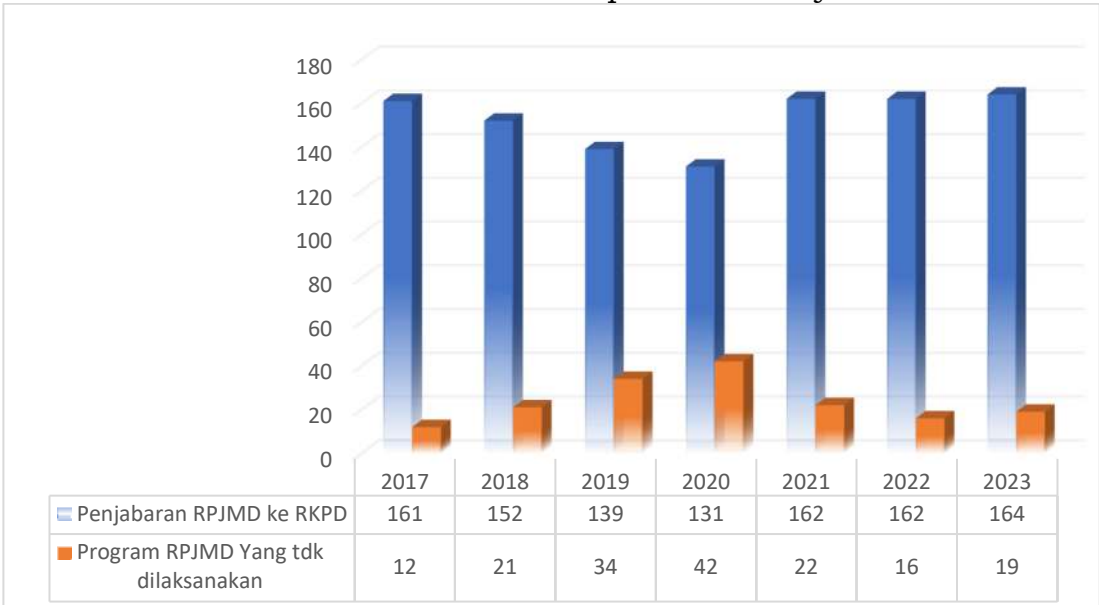
yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah menerjemahkan RPJMD dengan baik dan konsisten.

Gambar 2.2
Penjabaran RPJMD ke dalam RKPD



Sumber : Bapperida Kep Selayar 2025

Gambar 2.3
Evaluasi RPJMD Kepulauan Selayar



Sumber : Bapperida Kep Selayar 2025

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, didukung dengan kegiatan 1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, 2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Persentase kesesuaian program prioritas perangkat daerah dengan sasaran prioritas pembangunan daerah, indikator ini mengukur sejauh mana program prioritas yang diterapkan oleh perangkat daerah sesuai dengan sasaran prioritas pembangunan daerah. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah program prioritas perangkat daerah yang sesuai dengan sasaran prioritas pembangunan daerah dengan jumlah total program prioritas perangkat daerah. Semakin tinggi persentase kesesuaian, maka semakin baik program prioritas perangkat daerah mewujudkan sasaran prioritas pembangunan daerah. Ini penting untuk memastikan bahwa program pembangunan daerah efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Indikator ini juga membantu pemerintah daerah dalam memantau dan mengevaluasi kinerja program prioritas perangkat daerah dan memastikan bahwa program pembangunan daerah selaras dengan sasaran prioritas pembangunan daerah.

Tabel. 2.6
Matriks Program Prioritas Daerah yang mendukung
Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	1. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	1) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif	18 Program	15 Program	15 Program
2	2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	2) Pembangunan infrastruktur pendukung program strategis dan prioritas pada sub kawasan/sub sentra	11 Program	8 Program	8 Program
3	3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar		12 Program		
4	4. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	3) Peningkatan investasi sektor unggulan daerah			14 Program
		4) Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam bernilai ekonomi berbasis potensi desa	9 Program	9 Program	9 Program
5	5. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	5) Peningkatan derajat hidup masyarakat yang berkarakter, berbudaya dan bermartabat		19 Program	19 Program
6	6. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing		18 Program		
7	7. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	16 Program	7 Program	7 Program
	J U M L A H		84 Program	58 Program	72 Program

Sumber : RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar

Perumusan program prioritas RKPD Kepulauan Selayar mengacu pada tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun berkenaan, Harmonisasi dan Sinkronisasi pencapaian tersebut di atas dicapai melalui fasilitasi pendampingan penyusunan

dokumen perencanaan pada masing-masing bidang perencanaan Pembangunan diantaranya :

- a) Bidang Pemerintahan diantaranya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem, koordinasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data P3KE serta pemantuan capaian pelaksanaan SDGs;
- b) Bidang Pembangunan manusia diantaranya fasilitasi pendampingan penurunan angka stunting daerah, pengembangan regulasi anak putus sekolah (pengembangan rencana aksi daerah dan memastikan anggaran berbasis sektor), kesetaraan gender, Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Kabupaten Sehat;
- c) Bidang perekonomian diantaranya fasilitasi pendampingan Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau propinsi Sulawesi Selatan;
- d) Bidang Sumber Daya Alam diantaranya fasilitasi pendampingan Pamsimas (penyediaan air minum berbasis masyarakat), Sanimas (sanitasi berbasis masyarakat), RPSDA-WS dan Penyusunan KLHS RPJPD Selayar 2025-2045;
- e) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan diantaranya fasilitasi pendampingan Penyusunan RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar dan RDTR (Kawasan KIPT Hangkoang dan KEK Pasi Gusung) dan pendampingan Pisew (Penyelenggaraan Infrastruktur Ekonomi Wilayah).

2.3.2. Kinerja Pelayanan Urusan Penelitian dan Pengembangan

Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah pada Pasal 35 menyebutkan bahwa Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan berwenang dan bertanggung jawab atas kelitbangan pemerintahan dalam negeri di kabupaten/kota. Selanjutnya, pada pasal 15 ayat 5 dan 6 juga mengamanatkan bahwa ada

evaluasi dan pembinaan oleh Menteri atau Kepala Daerah kepada perumus kebijakan atau regulasi tentang pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan Lembaga Kelitbangan Kabupaten yang bertanggung jawab atas riset/kelitbangan dan pelaksanaan fungsinya, sehingga Bapperida juga harus memastikan bahwa setiap perumusan kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar harus memanfaatkan hasil-hasil riset/kelitbangan.

Dalam hubungannya dengan perencanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang berbasis kelitbangan sesuai Perbub yang telah disebutkan sebelumnya, maka beberapa fungsi utama Bidang Litbang antara lain pelaksanaan pengkajian, pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di kabupaten serta penyusunan kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten. Oleh sebab itu salah satu indikator kinerja sasaran yang dibebankan kepada bidang litbang adalah persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.

Tabel 2.7
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan di
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Hasil Kelitbangan Keseluruhan	3	7	4	4	3
2.	Jumlah Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan	3	7	4	4	3
3.	% Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100	100	100	100	100

Sumber : Bapperida Kepulauan Selayar 2024

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hampir semua Indikator Kinerja Bapperida dapat tercapai, namun demikian perlu terus ditingkatkan kualitas dari output dan dokumen. Adapun indikator yang capaiannya masih dibawah 100% adalah persentase program di luar RPJMD maupun persentase kegiatan di luar Renstra OPD hal ini disebabkan karena:

- 1) Komitmen Perangkat Daerah dalam penyusunan APBD berpedoman pada dokumen perencanaan (Renstra/Renja) masih kurang;
- 2) Adanya dinamika dalam pembahasan APBD dengan DPRD, dimana pokok-pokok pikiran DPRD tidak terakomodir dalam Renja tetapi muncul dalam penetapan APBD;
- 3) Adanya kebijakan dan kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi setelah Renja ditetapkan sehingga harus dimunculkan dalam APBD.

Langkah-langkah yang diambil Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencapai target konsistensi program perencanaan perangkat daerah yang belum tercapai dalam menyusun kegiatan, antara lain:

- 1) Meningkatkan sinkronisasi dokumen perencanaan sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku melalui penerapan teknologi informasi berbasis web (e-planning, e-budgeting);
- 2) Meningkatkan kapasitas SDM dan pembagian tanggung-jawab verifikasi perencanaan secara lebih spesifik;

2.3.3. Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Secara umum rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran pada Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan Negatif (-3%), adanya kebijakan yang harus diakomodir dalam renja meskipun pagu anggaran per tahun yang fluktuatif.

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2024

N o	Uraian **)	Anggaran pada tahun Ke-					Realisasi pada tahun Ke-					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke-								Rata-Rata Pertumbuhan			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	202 1	202 2	202 3	202 4	Anggara n	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					17	18	19
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.1.947.882.397	Rp.4.336.675.400	Rp 3.349.423.600	Rp 4.092.114.083	Rp 4.387.750.900	Rp 1.766.424.082	Rp 4.096.035.987	Rp 3.309.886.494	Rp 4.034.069.855	Rp.4.252.274.955	91%	94%	99%	99%	97%	55%	-29%	18%	7%	0,13	0,14	
a	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah	Rp.36.699.720	Rp.38.663.400	Rp 18.115.000	Rp 15.029.000	Rp 15.000.000	Rp 36.049.720	Rp 38.615.400	Rp 18.115.000	Rp 15.026.300	Rp 12.638.100	98%	100 %	100 %	100 %	84%	5%	-113%	-21%	0%	-0,32	-0,36	
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.46.054.150	Rp.3.021.059.000	Rp 2.548.753.000	Rp 2.918.850.283	Rp 3.276.102.600	Rp 45.645.750	Rp 2.898.208.566	Rp 2.516.779.348	Rp 2.904.497.658	Rp.3.190.204.565	99%	96%	99%	100 %	97%	98%	-19%	13%	11%	0,26	0,26	
c	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp.16.609.160	Rp.15.988.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 7.559.900	Rp 13.309.160	Rp 15.988.000	Rp 5.998.000	Rp 6.000.000	Rp 7.194.900	80%	100 %	100 %	100 %	95%	-4%	-166%	0%	21%	-0,37	-0,33	
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.120.000.000	Rp.114.265.000	Rp -	Rp 30.000.000	Rp 10.000.000	Rp 118.054.101	Rp 109.535.000	Rp -	Rp 23.050.000	Rp 3.875.000	98%	96%	0%	77%	39%	-5%	0%	100%	-200%	-0,26	-1,01	
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.439.992.964	Rp.458.268.000	Rp 352.907.800	Rp 515.386.000	Rp 559.749.500	Rp 333.153.120	Rp 433.711.711	Rp 352.411.273	Rp 504.652.653	Rp 557.331.271	76%	95%	100 %	98%	100 %	4%	-30%	32%	8%	0,03	0,10	
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.567.861.845	Rp.278.948.000	Rp -	Rp 125.899.000	Rp 59.775.200	Rp 542.968.845	Rp 253.393.000	Rp -	Rp 115.547.000	Rp 57.800.000	96%	91%	0%	92%	97%	104%	0%	100%	111%	-0,29	-0,29	
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.485.569.052	Rp.257.484.000	Rp 257.485.800	Rp 236.766.800	Rp 270.493.700	Rp 488.890.538	Rp 219.764.390	Rp 250.593.093	Rp 234.063.044	Rp 241.753.744	101 %	85%	97%	99%	89%	-89%	0%	-9%	12%	-0,21	-0,29	
h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.235.095.506	Rp.152.000.000	Rp 166.162.000	Rp 244.183.000	Rp 189.070.000	Rp 188.352.848	Rp 126.819.920	Rp 165.989.780	Rp 231.233.200	Rp 181.477.375	80%	83%	100 %	95%	96%	-55%	9%	32%	-29%	-0,11	-0,06	
B	PROGRAM PERENCANAAN,PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.999.217.415	Rp.1.217.961.400	Rp 656.629.000	Rp 1.044.083.000	Rp 969.898.700	Rp 764.332.692	Rp 1.088.769.198	Rp 623.292.292	Rp 985.679.555	Rp 911.448.329	76%	89%	95%	94%	94%	18%	-85%	37%	-8%	-0,10	-0,04	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp.308.800.000	Rp.849.347.400	Rp 371.959.000	Rp 736.588.000	Rp 694.444.500	Rp 228.767.190	Rp 785.039.481	Rp 357.121.517	Rp 704.186.355	Rp 656.169.129	74%	92%	96%	96%	94%	64%	128%	50%	-6%	-0,05	-0,02	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.447.963.415	Rp.114.335.000	Rp 47.918.000	Rp 51.287.000	Rp 44.014.000	Rp 341.913.102	Rp 97.264.400	Rp 47.376.487	Rp 39.794.000	Rp 41.234.500	76%	85%	99%	78%	94%	-292%	-139%	7%	-17%	-1,10	-0,93	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.242.454.000	Rp.254.279.000	Rp 236.752.000	Rp 256.208.000	Rp 231.440.200	Rp 193.652.400	Rp 206.465.317	Rp 218.794.288	Rp 241.699.200	Rp 214.044.700	80%	81%	92%	94%	92%	5%	-7%	8%	-11%	-0,01	0,02	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.627.549.922	Rp.840.457.100	Rp 572.653.000	Rp 665.226.000	Rp 560.528.400	Rp 553.568.654	Rp 694.427.950	Rp 538.677.743	Rp 661.481.871	Rp 534.837.600	88%	83%	94%	99%	95%	25%	-47%	14%	-19%	-0,07	-0,03	

N o	Uraian **)	Anggaran pada tahun Ke-					Realisasi pada tahun Ke-					Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke-								Rata-Rata Pertumbuhan		
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	202 1	202 2	202 3	202 4	Anggara n	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				17	18	19
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp.223.623.922	Rp.367.605.900	Rp 247.085.000	Rp 263.244.000	Rp 343.692.000	Rp 187.625.664	Rp 238.646.700	Rp 228.083.200	Rp 259.753.671	Rp 327.640.700	84%	65%	92%	99%	95%	39%	-49%	6%	23%	0,05	0,12
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp.137.312.000	Rp.245.572.500	Rp 116.622.000	Rp 163.065.000	Rp 65.435.400	Rp 125.214.375	Rp 242.599.632	Rp 115.633.547	Rp 163.065.000	Rp 60.504.700	91%	99%	99%	100 %	92%	44%	- 111%	28%	- 149%	-0,47	-0,50
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp.266.614.000	Rp.227.278.700	Rp 208.946.000	Rp 238.917.000	Rp 151.401.000	Rp 240.728.615	Rp 213.181.618	Rp 194.960.996	Rp 238.663.200	Rp 146.692.200	90%	94%	93%	100 %	97%	-17%	-9%	13%	-58%	-0,18	-0,17
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp.412.955.597	Rp.717.027.000	Rp 555.236.000	Rp 521.195.000	Rp 350.000.000	Rp 385.020.693	Rp 690.759.847	Rp 516.311.305	Rp 520.608.556	Rp 344.412.675	93%	96%	93%	100 %	98%	42%	-29%	-7%	-49%	-0,11	-0,10
	Penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian dan Peraturan	Rp.412.955.597	Rp.386.027.000	Rp 301.399.000	Rp 321.172.000	Rp 241.010.000	Rp 385.020.693	Rp 365.905.847	Rp 300.586.279	Rp 320.922.050	Rp 239.920.775	93%	95%	100 %	100 %	100 %	-7%	-28%	6%	-33%	-0,16	-0,14
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rp-	Rp-	Rp 148.421.000	Rp 149.899.000	Rp 57.993.000	Rp -	Rp -	Rp 131.101.000	Rp 149.799.000	Rp 54.975.500	0%	0%	88%	100 %	95%	0%	100%	1%	- 158%	-0,14	-0,15
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Rp.331.000.000	Rp 105.416.000	Rp 50.124.000	Rp 50.997.000		Rp 324.854.000	Rp 84.624.026	Rp 49.887.506	Rp 49.516.400	0%	98%	80%	100 %	97%	100%	214%	110%	2%	-0,56	-0,64
	T O T A L	Rp 3.987.605.331	Rp 7.112.120.900	Rp 5.133.941.600	Rp 6.322.618.083	Rp 6.268.178.000	Rp 3.469.346.121	Rp 6.569.992.982	Rp 4.988.167.834	Rp 6.201.839.837	Rp 6.042.973.559	87%	91%	95%	98%	96%	35%	-48%	16%	-17%	-3%	-1%

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Bapperida Kepulauan Selayar merupakan unit kerja dalam struktur organisasi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam menyusun, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, berperan sebagai nerve center dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan yang selaras dengan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), serta prioritas nasional dan lokal, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melayani organisasi perangkat daerah.

2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Memberikan Layanan

Bapperida dalam menjalankan fungsi riset dan inovasi bermitra dengan berbagai pihak agar dapat menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang dapat memberikan solusi bagi pemangku kepentingan dalam mengatasi masalah Pembangunan daerah,. mitra tersebut di golongkan dalam beberapa kelompok :

- a) Sektor akademik, penelitian dan pendanaan (penyedia ilmu pengetahuan dan pendukung ekosistem), seperti universitas, lembaga pendanaan/riset pemerintah, sekolah vakasi/SMK;
- b) Sektor Bisnis dan Industri (pengguna dan komersialisasi), seperti UMKM/Koperasi, Perusahaan Swasta;
- c) Mitra Pemerintah dan Masyarakat sebagai Pengguna Akhir dan Regulator, seperti Perangkat Daerah, kelompok Masyarakat/komunitas dan pengambil kebijakan;

2.6. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi Bapperida dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian dan kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek pelaksanaan tugas dan fungsi. Sesuai dengan rumusan masalah pada rancangan akhir RPJMD Kepulauan Selayar 2025-2029, dijabarkan 17 (tujuh belas) permasalahan utama dimana Bapperida terkait dengan

permasalahan pertama yaitu ***“Belum optimal pelayanan publik dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan”*** dengan rumusan masalah pokok yakni ***“belum optimalnya partisipasi Masyarakat sipil yang inklusif dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan”***. akar permasalahan terkait tugas dan fungsi Bapperida adalah ***“tingkat konsistensi dokumen perencanaan Pembangunan daerah yang belum optimal”***.

Berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja periode tahun 2021 – 2024 serta inventarisasi permasalahan aktual berkaitan dengan tugas dan fungsi utama Bapperida, dikemukakan beberapa permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

- a) Inkonsistensi antar dokumen perencanaan Pembangunan, baik antara program OPD terhadap RPJMD, RKPD dan APBD. Inkonsistensi dokumen perencanaan periode 2021 – 2024 dapat dilihat dari persentase kesesuaian Program RPJMD dengan RKPD, dimana tahun 2021 sebesar 88,04% naik menjadi 89,62% pada tahun 2023. kesesuaian antar dokumen perencanaan harus senantiasa dikoordinasikan untuk mempertahankan capaian optimal sebagai perwujudan dari perencanaan yang ideal;
- b) Pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan masih terbatas, dapat dilihat dari aplikasi e-planning, e-monev, dan big data yang belum terintegrasi;
- c) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan masih rendah dapat dilihat dari Musrenbang masih bersifat formalitas, Aspirasi dari tingkat bawah sering tidak tersambung ke prioritas daerah, dan Belum ada mekanisme partisipasi publik yang inklusif dan berkelanjutan;
- d) Pemanfaatan hasil evaluasi dalam perencanaan berikutnya belum optimal;
- e) Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan inovasi daerah telah menunjukkan hasil yang optimal (100%), meskipun jumlah hasil/rekomendasi yang di hasilkan

mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal ini disebabkan minimnya alokasi anggaran dan keterbatasan anggaran operasional untuk kegiatan penelitian atau riset, Sehingga penganbilan kebijakan dalam mengatasi permasalahan pembangunan tidak berbasis data dan informasi yang akurat/mutakhir, membuat perencanaan tidak berbasis bukti.

2.7. Isu Strategis

Identifikasi isu-isu strategis didasarkan pada isu global, nasional dan regional serta dirumuskan berdasarkan kajian KLHS RPJMD 2025-2029, Renstra kementrian/Lembaga lainnya yang dapat mempengaruhi tugas dan fungsi perangkat daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Tabel 2.9
Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD		Isu Strategis PD
			Nasional	Regional	
Daerah Otonomi	Inkonsistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan	Tata kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
	Minimnya Rekomendasi Kebijakan berbasis bukti				Minimnya alokasi anggaran riset dan inovasi

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar, meliputi potensi permasalahan, peluang dan tantangan yang dihadapi, serta Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Bapperida pada 5 (lima) tahun kedepan dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas koordinasi, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

Lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan, perumusan program

sectoral, partisipasi publik yang bersifat formalistik, tumpang tindihnya pendanaan program yang secara tidak langsung menghambat pencapaian visi dan misi kepala daerah, untuk itu Bapperida sebagai koordinator perencanaan Pembangunan, dalam menentukan target perencanaan dan penganggaran harus menganut prinsip “e-performance based budgeting” dan money follow program, serta memadukan hasil evaluasi Pembangunan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi publik sehingga seluruh program dan kegiatan perangkat daerah berdampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta meningkatkan integrasi program dan kegiatan lintas sektoral, baik dalam pengembangan wilayah, pemerintahan, sosial, budaya, maupun ekonomi daerah.

2. Riset dan Inovasi sebagai katalisator perencanaan Pembangunan daerah;

Pemanfaatkan hasil kajian/rekomendasi penelitian riset dan inovasi belum optimal, selain permasalahan pada pendanaan, dibutuhkan peta jalan riset daerah dalam menjawab permasalahan riil Pembangunan daerah, sehingga skema pendanaan dari pihak ketiga seperti hibah dan kerja sama dengan kampus/BRIN melalui hilirisasi riset dapat terfokus atau terarah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Strategis

Berdasarkan hasil analisis permasalahan dan isu strategis pada bab sebelumnya, serta memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar yang berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. maka telah dilakukan telaahan terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan pembangunan dapat disimpulkan bahwa Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar mendukung pencapaian tujuan **1) “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan”** dan sasaran **meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif**, dengan strategi yang menjadi prioritas adalah **“Peningkatan sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif, integratif dan aplikatif”**. Dari hasil telaahan tersebut, maka pokok-pokok perwujudan tujuan Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati Kepulauan Selayar, yaitu :

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan daerah,

Dengan demikian rumusan pernyataan tujuan pada Renstra Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, yaitu **Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang Akuntabel, inovatif dan berkelanjutan** dengan indikator capaian dari tujuan ini adalah **Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah**. Indikator ini mengukur sejauh mana rencana Pembangunan disusun, diintegrasikan dan selaras dengan tujuan Pembangunan nasional.

3.2 Sasaran Strategis

Dalam mendukung pencapaian pernyataan tujuan serta mempertimbangan tugas pokok dan fungsi Bapperida yang terkait dengan aturan-aturan perencanaan, maka ditetapkan sasaran Strategis, yaitu **(a) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (b) Meningkatnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah (di semua level dokumen perencanaan) (c) Meningkatnya penerapan riset dan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah.** Adapun indikator capaian dari sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP dan Indeks kepuasan

- Nilai Sakip, Indikator ini mengukur sejauh mana perangkat daerah menerapkan perencanaan, penganggaran, dan kinerja instansi berjalan selaras untuk mencapai tujuan pembangunan, dan hasilnya menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu perangkat daerah.
- Indeks Kepuasan, Indikator ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat (pengguna layanan) terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan.

2. Persentase Program Prioritas Pembangunan Nasional yang didukung oleh Program Prioritas Pembangunan Daerah;

Indikator ini mengukur kontribusi program daerah terhadap pencapaian sasaran program nasional. Ini dapat berupa peningkatan angka, pengurangan angka, atau persentase perubahan tertentu dalam parameter yang relevan dengan program nasional, dengan tujuan membantu mengidentifikasi program daerah mana yang paling efektif dalam mendukung program nasional, dan juga membantu dalam perencanaan dan evaluasi program daerah di masa depan.

3. Persentase hasil riset dan penerapan inovasi daerah yang dimanfaatkan;

Indikator ini mengukur seberapa besar hasil riset dan inovasi daerah yang telah diterapkan dan memberikan manfaat bagi Masyarakat, seperti 1) dampak penerapan riset terhadap

peningkatan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi, atau solusi terhadap masalah-masalah daerah dan 2) dampak penerapan inovasi terhadap peningkatan produktivitas, penurunan biaya, atau peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 3.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapperida

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang Akuntabel, inovatif dan berkelanjutan		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	50	55	60	65	70	75	
			Nilai Sakip	BB	BB	BB	BB	BB	A	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B	B	B	B	
		Meningkatnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah (di semua level dokumen perencanaan)	Persentase Program Prioritas Pembangunan Nasional yang didukung oleh Program Prioritas Pembangunan Daerah	95	95	95	95	95	95	
		Meningkatnya penerapan riset dan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil riset dan penerapan inovasi daerah yang dimanfaatkan	100	100	100	100	100	100	

3.3 Strategi PD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam rencana pembangunan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan pendekatan yang holistik, terukur, dan adaptif. Berikut adalah strategi yang diterapkan pada setiap tahapan pelaksanaan :

- a) Tahap 1 (2026): Pembenahan Sistem Perencanaan dan Penguatan Kelembagaan.

Membenahi sistem perencanaan dan memperkuat kelembagaan dengan langkah konkret meliputi peningkatan transparansi melalui penerapan sistem monitoring dan evaluasi (Monev) berbasis digital, serta audit internal terhadap dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan APBD dengan Inovasi di peningkatan partisipasi publik melalui platform digital seperti e-Musrenbang untuk melibatkan masyarakat secara langsung.

- b) Tahap 2 (2027): Penguatan Data dan Kolaborasi

Fokus Implementasi sistem e-Government untuk pelaporan kinerja (e-LKPD) menjadi prioritas, dengan penerapan inovasi penggunaan teknologi GIS dalam perencanaan tata ruang dan penerapan smart city.

- c) Tahap 3 (2028): Implementasi dan Evaluasi

Sistem reward dan punishment bagi SKPD diterapkan berdasarkan capaian target, dengan menerapkan Pengembangan sistem perencanaan berbasis Big Data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis bukti.

- d) Tahap 4 (2029): Konsolidasi dan Replikasi Inovasi

Menekankan evaluasi mandiri oleh masyarakat melalui survei kepuasan pelayanan, memastikan bahwa pembangunan tetap berorientasi pada kebutuhan publik, meningkatkan kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam pengembangan riset pembangunan daerah yang berkelanjutan.

e) Tahap 5 (2030): Pemantapan dan Penyusunan RPJMD Baru

Di tahun terakhir, 2030, fokusnya adalah pemantapan pencapaian dan penyusunan RPJMD baru. Evaluasi komprehensif selama 5 tahun dilakukan untuk mengukur keberhasilan pembangunan, dengan menerapkan inovasi pendekatan evidence-based policy dalam penyusunan RPJMD baru.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra PD

Tahap 1 2026	Tahap 2 2027	Tahap 3 2028	Tahap 4 2029	Tahap 5 2030
Pembenahan Sistem Perencanaan dan Penguatan Kelembagaan	Penguatan Data dan Kolaborasi	Implementasi dan Evaluasi	Konsolidasi dan Replikasi Inovasi	Pemantapan dan Penyusunan RPJMD Baru
Akuntabilitas :	Akuntabilitas :	Akuntabilitas :	Akuntabilitas :	Akuntabilitas :
• peningkatan transparansi dengan penerapan sistem monitoring dan evaluasi (Monev) berbasis digital. • audit internal terhadap dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, APBD)	Implementasi sistem e-Government untuk pelaporan kinerja (e-LKPD)	Penerapan sistem reward & punishment bagi SKPD berdasarkan capaian target RPJMD.	Evaluasi mandiri oleh masyarakat melalui survei kepuasan masyarakat	Evaluasi komprehensif 5 tahun pencapaian RPJMD
Inovasi :	Inovasi :	Inovasi :	Inovasi :	Inovasi :
meningkatkan partisipasi publik melalui platform (e-Musrenbang) untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan	Penguatan penggunaan teknologi GIS dalam perencanaan tata ruang dan penerapan smart city.	Pengembangan sistem perencanaan berbasis Big Data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis bukti	Meningkatkan Kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam riset/inovasi Pembangunan yang berkelanjutan	Penyusunan RPJMD baru dengan pendekatan evidence-based policy

3.4 Arah Kebijakan PD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil analisis terhadap tantangan, isu strategis, serta peluang dan strategi untuk memastikan relevansi keberlanjutan perencanaan perangkat daerah maka dirumuskan arah kebijakan secara komprehensif tentang cara dan respon mencapai tujuan, sasaran dan strategi dengan efektif dan efisien yang diwujudkan dalam perumusan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bapperida yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029.

Tabel 3.3
Rumusan Arah Kebijakan Restra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
1	Pengoptimalan Koordinasi, sinkronisasi Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah melalui sistem informasi terintegrasi;	Menerapkan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan (sasaran 1)	Peningkatan Koordinasi, Pengendalian, Evaluasi serta Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
			Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas, serta pencapaian target kinerja lintas sektoral
2	Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah		Peningkatan Inisiasi hasil riset inovasi berbasis terapan, tematik dan aplikatif untuk mencapai Visi Misi pembangunan daerah

BAB IV
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penjabaran cascading Rencana Strategis Perangkat Daerah secara operasional yang lebih rinci ke dalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, disertai indikator kinerja, target dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, dirancang sesuai dengan perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan guna mendukung pencapaian target prioritas pembangunan daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah serta mengakomodir beberapa isu strategis yang ingin dicapai pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
Meningkatnya Birokrasi Pemerintahan Transparan dan Kolaboratif	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang Akuntabel, inovatif dan berkelanjutan				Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang akuntabel berbasis akrual			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Nilai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat		
			Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja OPD Persentase Capaian Realisasi Anggaran OPD Persentase realisasi capaian indikator kinerja kunci OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terselenggaranya proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tertib waktu untuk menjamin kepastian pelaksanaan program dan akuntabilitas kinerja organisasi	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Terselenggaranya Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan yang Tepat Waktu sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan yang Tepat Waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Terselenggaranya Tertib Administrasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Guna Menunjang Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Peyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terselenggaranya Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur guna mendukung efektivitas birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi	Persentase Aparatur yang di tingkatkan Kualitas dan Kapabilitasnya	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terselenggaranya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Efektifitas dan Berkualitas	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah yang di selenggarakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah dalam Menunjang Kelancaran, Kualitas dan Efektivitas Urusan Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terselenggaranya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Berkualitas	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Barang Milik Daerah yang Handal/Reliabel dalam Mendukung Pelayanan Publik	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
		Meningkatnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah (di semua level dokumen perencanaan)			Persentase Program Prioritas Pembangunan Nasional yang didukung oleh Program Prioritas Pembangunan Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Program Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
				Tercapainya Tingkat Kesesuaian antara Perencanaan, Penganggaran, dan Implementasi Pembangunan	Persentase Kesesuaian Dokumen perencanaan dan pendanaan dengan dokumen pelaksanaan pembangunan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
				Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
				Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
				Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
				Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Kajian Data dan Informasi sebagai Dasar Perumusan Perencanaan Pembangunan	Persentase Ketersediaan dokumen data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah dalam Meningkatkan	Persentase Rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang dimanfaatkan	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Efektivitas dan Kualitas Kebijakan Daerah			
				Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
				Terkendalnya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	
				Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; Bidang Perekonomian dan SDA.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Tercapainya Tingkat Efektivitas Perencanaan Pembangunan dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Tercapainya Tingkat Efektivitas Perencanaan Pembangunan dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Daerah Bidang Perekonomian	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Daerah Bidang Perekonomian	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
				Tercapainya Tingkat Efektivitas Perencanaan Pembangunan dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun tepat waktu	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
				Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					Daerah Bidang Kewilayahan		
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
		Meningkatnya penerapan riset dan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah			Persentase hasil riset dan penerapan inovasi daerah yang dimanfaatkan		
			Meningkatnya pemanfaatan riset dan inovasi daerah dalam pembangunan	Meningkatnya pemanfaatan riset dan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase pemanfaatan riset pada dokumen perencanaan	Program Riset dan Inovasi Daerah	
					Persentase penerapan inovasi daerah		
				Tersedianya hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penrapan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan, bagi pemangku kepentingan	Persentase Hasil Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian yang di manfaatkan	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
				Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
				Tercapainya Tingkat Adopsi dan Pemanfaatan Produk Inovasi guna mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	Invensi dan Inovasi	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	RENCANA TAHUN 2026		RENCANA TAHUN 2027		RENCANA TAHUN 2028		RENCANA TAHUN 2029		RENCANA TAHUN 2030	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
URUSAN X.XX												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja OPD	100%	90%	4.375.062.848	90%	3.879.644.500	90%	3.877.616.900	90%	4.175.783.800	90%	4.306.979.800
	Persentase Capaian Realisasi Anggaran OPD	97%	95%		95%		95%		95%		95%	
	Persentase realisasi capaian indikator kinerja kunci OPD		95%		95%		95%		95%		95%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	100	64.319.000	100	37.500.000	100	37.500.000	100	37.500.000	100	37.500.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	3 Dokumen	2.000.000	3 Dokumen	2.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.500.000
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	n.a	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	n.a		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	RENCANA TAHUN 2026		RENCANA TAHUN 2027		RENCANA TAHUN 2028		RENCANA TAHUN 2029		RENCANA TAHUN 2030	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	n.a	1 Berita Acara	19.319.000	1 Berita Acara	10.000.000	1 Berita Acara	10.000.000	1 Berita Acara	10.000.000	2 Berita Acara	10.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	n.a	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000
Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	n.a		-		-		-		-		-
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	n.a	1 Berita Acara	18.000.000	1 Berita Acara	10.000.000	1 Berita Acara	10.000.000	1 Berita Acara	10.000.000	1 Berita Acara	10.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan yang Tepat Waktu	100%	100	3.340.000.000	100	3.011.000.000	100	3.011.000.000	100	3.305.883.800	100	3.439.079.800
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	31 Orang	3.320.000.000	31 Orang	3.000.000.000	31 Orang	3.000.000.000	31 Orang	3.294.883.800	31 Orang	3.428.079.800
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	n.a		-		-		-		-		-
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	24 Dokumen	12.000.000	24 Dokumen	5.000.000	24 Dokumen	5.000.000	24 Dokumen	5.000.000	24 Dokumen	5.000.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	n.a		-		-		-		-		-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	4.000.000	2 Laporan	4.000.000	2 Laporan	4.000.000	2 Laporan	4.000.000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	n.a		-		-		-		-		-
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	n.a		-		-		-		-		-

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	RENCANA TAHUN 2026		RENCANA TAHUN 2027		RENCANA TAHUN 2028		RENCANA TAHUN 2029		RENCANA TAHUN 2030	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Peyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu	100%	100	6.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	6.000.000	100	4.000.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	n.a		-		-		-		-		-
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	n.a		-		-		-		-		-
Koordinasi dan Panilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	n.a		-		-		-		-		-
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	n.a		-		-		-		-		-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	3.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	3.000.000	4 Laporan	2.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	3.000.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	3.000.000	2 Laporan	2.000.000
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	n.a		-		-		-		-		-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang di tingkatkan Kualitas dan Kapabilitasnya	100%	100	25.000.000		-		-		-		-
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	n.a		-		-		-		-		-
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Pasang		-		-		-		-		-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	n.a		-		-		-		-		-
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	n.a		-		-		-		-		-
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	n.a		-		-		-		-		-
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	n.a		-		-		-		-		-
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	n.a		-		-		-		-		-
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	n.a		-		-		-		-		-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	n.a	5 Orang	25.000.000		-		-		-		-

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	RENCANA TAHUN 2026		RENCANA TAHUN 2027		RENCANA TAHUN 2028		RENCANA TAHUN 2029		RENCANA TAHUN 2030	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	n.a		-		-		-		-		-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	n.a		-		-		-		-		-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah yang di selenggarakan	100%	100	397.400.000	100	342.400.000	100	342.400.000	100	342.400.000	100	342.400.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	n.a		-		-		-		-		-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n.a		-		-		-		-		-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	n.a		-		-		-		-		-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	n.a		-		-		-		-		-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.000.000	12 Paket	20.000.000	12 Paket	20.000.000	12 Paket	20.000.000	12 Paket	20.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	n.a		-		-		-		-		-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	n.a		-		-		-		-		-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131 Laporan	60 Laporan	300.000.000	60 Laporan	250.000.000	60 Laporan	250.000.000	60 Laporan	250.000.000	60 Laporan	250.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	n.a		-		-		-		-		-
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	52.400.000	1 Dokumen	52.400.000	1 Dokumen	52.400.000	1 Dokumen	52.400.000	1 Dokumen	52.400.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%		-		-		-		-		-
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	n.a		-		-		-		-		-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n.a		-		-		-		-		-
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	n.a		-		-		-		-		-
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	n.a		-		-		-		-		-

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	RENCANA TAHUN 2026		RENCANA TAHUN 2027		RENCANA TAHUN 2028		RENCANA TAHUN 2029		RENCANA TAHUN 2030	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	n.a		-		-		-		-		-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		-		-		-		-		-
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	n.a		-		-		-		-		-
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	n.a		-		-		-		-		-
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n.a		-		-		-		-		-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		-		-		-		-		-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n.a		-		-		-		-		-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100	494.681.000	100	335.000.000	100	330.000.000	100	330.000.000	100	330.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	n.a		-		-		-		-		-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	42.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n.a		-		-		-		-		-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	452.681.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	100	47.662.848	100	149.744.500	100	152.716.900	100	154.000.000	100	154.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	n.a		-		-		-		-		-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	43.662.848	17 Unit	145.744.500	17 Unit	148.716.900	17 Unit	150.000.000	17 Unit	150.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	n.a		-		-		-		-		-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	n.a		-		-		-		-		-
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		-		-		-		-		-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		-		-		-		-		-

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	RENCANA TAHUN 2026		RENCANA TAHUN 2027		RENCANA TAHUN 2028		RENCANA TAHUN 2029		RENCANA TAHUN 2030	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	n.a		-		-		-		-		-
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	1 Unit	4.000.000	1 Unit	4.000.000	1 Unit	4.000.000	1 Unit	4.000.000	1 Unit	4.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		-		-		-		-		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit		-		-		-		-		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n.a		-		-		-		-		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	n.a										
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN												
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	95	802.750.000	95	570.899.000	95	634.057.400	95	664.498.100	95	558.358.200
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Kesesuaian Dokumen perencanaan dan pendanaan dengan dokumen pelaksanaan pembangunan	100%	95	607.750.000	95	395.899.000	95	447.000.000	95	447.000.000	95	423.358.200
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	30.000.000
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	42.750.000	1 Dokumen	20.899.000	1 Dokumen	22.000.000	2 Dokumen	22.000.000	1 Dokumen	20.000.000
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	1 Berita Acara	40.000.000	1 Berita Acara	30.000.000	1 Berita Acara	30.000.000	1 Berita Acara	30.000.000	2 Berita Acara	30.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	n.a		-		-		-		-		-
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	60.000.000	1 Berita Acara	30.000.000	1 Berita Acara	30.000.000	1 Berita Acara	30.000.000	2 Berita Acara	18.358.200
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	440 Usulan	440 Usulan	45.000.000	440 Usulan	25.000.000	440 Usulan	25.000.000	440 Usulan	25.000.000	440 Usulan	25.000.000
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	2 Dokumen	380.000.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	300.000.000
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan	100%	100	65.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	82.498.100	100	60.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	RENCANA TAHUN 2026		RENCANA TAHUN 2027		RENCANA TAHUN 2028		RENCANA TAHUN 2029		RENCANA TAHUN 2030	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	27.498.100	1 Dokumen	20.000.000
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	28 Orang	28 Orang	20.000.000	28 Orang	15.000.000	28 Orang	15.000.000	28 Orang	15.000.000	28 Orang	15.000.000
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	20.000.000	1 Buku	20.000.000	1 Buku	20.000.000	1 Buku	40.000.000	1 Buku	25.000.000
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang dimanfaatkan	100%	100	130.000.000	100	120.000.000	100	132.057.400	100	135.000.000	100	75.000.000
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	32.057.400	2 Laporan	35.000.000	2 Laporan	25.000.000
Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	n.a	1 Kerjasama	-	1 Kerjasama	-	1 Kerjasama	-	1 Kerjasama	-	1 Kerjasama	-
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	50.000.000
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Implementasi Sistem Informasi terhadap perencanaan pembangunan daerah			-		-		-		-		-
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	n.a		-				-		-		-
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	n.a		-								
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	n.a		-								
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RKPd dengan Renja PD	100%	95	700.000.000	95	415.477.000	95	470.596.300	95	410.705.900	95	383.702.300
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	95	294.000.000	95	174.000.000	95	219.342.800	95	180.000.000	95	190.000.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir	11 Dokumen	11 Dokumen	7.000.000	11 Dokumen	7.000.000	11 Dokumen	4.000.000	11 Dokumen	3.000.000	11 Dokumen	3.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	RENCANA TAHUN 2026		RENCANA TAHUN 2027		RENCANA TAHUN 2028		RENCANA TAHUN 2029		RENCANA TAHUN 2030	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11 Laporan	11 Perangkat Daerah	5.000.000	11 Perangkat Daerah	5.000.000	11 Perangkat Daerah	5.000.000	11 Perangkat Daerah	2.000.000	11 Perangkat Daerah	2.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11 Laporan	11 Laporan	50.000.000	11 Laporan	20.000.000	11 Laporan	20.000.000	11 Laporan	20.000.000	11 Laporan	20.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	20.000.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	5 Dokumen	7.000.000	5 Dokumen	7.000.000	5 Dokumen	5.342.800	5 Dokumen	3.000.000	5 Dokumen	3.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	5 Perangkat Daerah	5.000.000	5 Perangkat Daerah	5.000.000	5 Perangkat Daerah	5.000.000	5 Perangkat Daerah	2.000.000	5 Perangkat Daerah	2.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	5 Laporan	80.000.000	5 Laporan	50.000.000	5 Laporan	50.000.000	5 Laporan	40.000.000	5 Laporan	40.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	95	164.000.000	95	137.000.000	95	136.500.000	95	121.756.280	95	93.556.560
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	7.000.000	3 Dokumen	7.000.000	3 Dokumen	4.000.000	3 Dokumen	3.000.000	3 Dokumen	3.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	3 Perangkat Daerah	5.000.000	3 Perangkat Daerah	4.000.000	3 Perangkat Daerah	4.000.000	3 Perangkat Daerah	3.000.000	3 Perangkat Daerah	2.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	24.000.000	1 Laporan	23.000.000	1 Laporan	12.500.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	RENCANA TAHUN 2026		RENCANA TAHUN 2027		RENCANA TAHUN 2028		RENCANA TAHUN 2029		RENCANA TAHUN 2030	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian											
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	33.500.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	20.000.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	7.000.000	3 Dokumen	7.000.000	3 Dokumen	7.000.000	3 Dokumen	3.000.000	3 Dokumen	3.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	3 Perangkat Daerah	5.000.000	3 Perangkat Daerah	4.000.000	3 Perangkat Daerah	4.000.000	3 Perangkat Daerah	3.000.000	3 Perangkat Daerah	2.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	26.756.280	1 Laporan	21.056.560
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	95	242.000.000	95	104.477.000	95	114.753.500	95	108.949.620	95	100.145.740
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	7.000.000	3 Dokumen	7.000.000	3 Dokumen	4.000.000	3 Dokumen	3.000.000	3 Dokumen	3.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3 Perangkat Daerah	5.000.000	3 Perangkat Daerah	4.000.000	3 Perangkat Daerah	4.000.000	3 Perangkat Daerah	3.000.000	3 Perangkat Daerah	2.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	140.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	26.645.740
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	30.753.500	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	18.500.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	12 Dokumen	7.000.000	12 Dokumen	5.024.400	12 Dokumen	7.000.000	12 Dokumen	3.000.000	12 Dokumen	3.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	RENCANA TAHUN 2026		RENCANA TAHUN 2027		RENCANA TAHUN 2028		RENCANA TAHUN 2029		RENCANA TAHUN 2030	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12 Laporan	12 Perangkat Daerah	5.000.000	12 Perangkat Daerah	4.000.000	12 Perangkat Daerah	4.000.000	12 Perangkat Daerah	3.000.000	12 Perangkat Daerah	2.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	18.000.000	1 Laporan	34.452.600	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	16.949.620	1 Laporan	15.000.000
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%										
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan	100%										
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	3 Laporan										
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan										
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	n.a										
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	n.a										
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	n.a										
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi,	n.a										

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	RENCANA TAHUN 2026		RENCANA TAHUN 2027		RENCANA TAHUN 2028		RENCANA TAHUN 2029		RENCANA TAHUN 2030	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketertarikan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketertarikan Umum dan Perlindungan Masyarakat											
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	n.a										
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	n.a										
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	n.a										
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	n.a										
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	n.a										
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	n.a										
Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	n.a										
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	n.a										
Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	n.a										
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan	100%										

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	RENCANA TAHUN 2026		RENCANA TAHUN 2027		RENCANA TAHUN 2028		RENCANA TAHUN 2029		RENCANA TAHUN 2030	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	1 Dokumen										
Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	n.a										
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	n.a										
Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	n.a										
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	n.a										
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	n.a										
Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	n.a										
Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	n.a										
Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	n.a										
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	n.a										
Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	n.a										
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan											
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	n.a										
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	n.a										
Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	n.a										
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	n.a										

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	RENCANA TAHUN 2026		RENCANA TAHUN 2027		RENCANA TAHUN 2028		RENCANA TAHUN 2029		RENCANA TAHUN 2030	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	n.a										
Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	n.a										
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	n.a										
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	n.a										
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	n.a										
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	n.a										
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	n.a										
Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	n.a										
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	n.a										
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dimanfaatkan	100%										
Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	n.a										
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	n.a										
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan										
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	n.a										
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	n.a										

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	RENCANA TAHUN 2026		RENCANA TAHUN 2027		RENCANA TAHUN 2028		RENCANA TAHUN 2029		RENCANA TAHUN 2030	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase pemanfaatan riset pada dokumen perencanaan	n.a	100	400.000.000	100	632.558.400	100	840.480.200	100	989.203.400	100	1.205.006.900
	Persentase Penerapan Inovasi Daerah	n.a	50		50		50		50		50	
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase Hasil Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian yang di manfaatkan	n.a	100	230.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	479.203.400	100	512.926.614
Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	n.a	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000
Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	n.a	1 Naskah	130.000.000	1 Naskah	100.000.000	1 Naskah	100.000.000	1 Naskah	144.882.400	1 Naskah	170.000.000
Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	n.a	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	170.000.000	1 Laporan	142.926.614
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	n.a		-		-		-		-		-
Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	n.a		-		-		-	1 Kegiatan	64.321.000	1 Kegiatan	100.000.000
Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	n.a										
Invensi dan Inovasi	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	n.a	50	170.000.000	50	332.558.400	50	540.480.200	50	510.000.000	50	692.080.286
Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	n.a										
Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	n.a		-		-		-		-		-
Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	n.a	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	90.000.000	1 Laporan	100.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	RENCANA TAHUN 2026		RENCANA TAHUN 2027		RENCANA TAHUN 2028		RENCANA TAHUN 2029		RENCANA TAHUN 2030	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	n.a		-		-		-		-		-
Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	n.a		-		-	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000
Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	n.a						-	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000
Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	n.a		-		-		-		-		-
Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi inovator)	n.a		-		-		-		-		-
Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	n.a		-		-	1 Kegiatan	130.480.200		-	1 Kegiatan	140.000.000
Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	n.a		-		-		-		-		-
Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	n.a		-		-		-		-		-
Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	n.a	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	150.000.000
Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	n.a		-		-		-		-		-

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	RENCANA TAHUN 2026		RENCANA TAHUN 2027		RENCANA TAHUN 2028		RENCANA TAHUN 2029		RENCANA TAHUN 2030	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	n.a		-		-		-		-		-
Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	n.a		-		-		-		-		-
Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	n.a		-		-		-		-		-
Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	n.a		-		-		-		-		-
Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	n.a		-		-		-		-		-
Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	n.a		-	1 Naskah	132.558.400	1 Naskah	100.000.000	1 Naskah	100.000.000	1 Naskah	102.080.286
Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	n.a		-		-		-		-		-
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	n.a		-		-		-		-		-
Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	n.a		-		-		-		-		-
Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	n.a		-		-		-		-		-
Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	n.a		-		-		-		-		-
Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	n.a		-		-		-		-		-
Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	n.a		-		-		-		-		-

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Penguatan Fiskal daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
			Pelaksanaan Konsultasi Publik
			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
			Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
2	Penguatan Fiskal daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; Bidang Perekonomian dan SDA.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan

			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
3	Penguatan Fiskal daerah	Meningkatnya pemanfaatan riset dan inovasi daerah dalam pembangunan	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
			Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
			Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset
			Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
			Invensi dan Inovasi
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual
			Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama PD

No	IKU (Indikator Kinerja Utama)	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	50	55	60	65	70	75	
2	Persentase Program Prioritas Pembangunan Nasional yang didukung oleh Program Prioritas Pembangunan Daerah	Persen	95	95	95	95	95	95	
3	Persentase hasil riset dan penerapan inovasi daerah yang dimanfaatkan	Persen	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci PD

No	IKK (Indikator Kinerja Kunci)	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	95	95	95	95	95	95	
2	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD	Persen	95	95	95	95	95	95	
3	Persentase Pemanfaatan riset pada Dokumen Perencanaan	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penerapan Inovasi Daerah	Persen	50	50	50	50	50	50	

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah disusun sebagai instrument/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, inovatif serta mencerminkan komitmen Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan sumber daya, memperkuat kolaborasi antar-pemangku kepentingan, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap strategi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

- a) Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 dijabarkan kedalam Dokumen Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah Tahun 2026 - 2029 dengan tujuan menjaga konsistensi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan daerah;
- b) Guna memastikan pencapaian Tujuan, sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, dibutuhkan penyesuaian terhadap peta proses bisnis, standar operasional prosedur serta metode pengukuran dan evaluasi kinerja, agar kolaborasi dan koordinasi antar unit kerja dapat optimal.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

- a) Dalam rangka menjaga efektivitas, efisiensi serta memastikan pencapaian target, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan, maka Kepala Badan menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebagai dasar pengukuran capaian kinerja rencana strategis

perangkat daerah secara berkala berdasarkan kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b) Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan reviu Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Benteng, Agustus 2025

KEPALA BAPPERIDA

Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19840104 200903 2 003